

PENGARUH KINERJA KEUANGAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI PASCA KONVERGENSI IFRS

Khairina Nur Izzaty, Pratomo Cahyo Kurniawan

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng
izzaty33@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan, struktur kepemilikan dan corporate governance terhadap praktik pengungkapan pihak berelasi pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konsisten dengan penelitian sebelumnya terkait pengungkapan pihak berelasi, dalam penelitian ini, tingkat pengungkapan pihak berelasi diuji dengan menggunakan indeks pengungkapan berdasar persyaratan wajib dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan pihak-pihak berelasi. Selanjutnya, hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan pihak berelasi.

Keywords: *Pengungkapan pihak-pihak berelasi, karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, GCG*

1. Pendahuluan

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik yang umum terjadi pada suatu bisnis. Dalam keadaan ini, entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi *investee* melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas.

Transaksi pihak berelasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan, karena pengungkapan tersebut merupakan kunci bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan dan memahami dampak transaksi pada perusahaan, termasuk adanya transfer kekayaan (Kohlbeck dan Mayhew, 2010). Pengungkapan transaksi pihak berelasi ini juga terkait dengan kepentingan perpajakan, karena pada umumnya transaksi pihak berelasi digunakan untuk penghindaran pajak. Adanya aturan tentang pengungkapan pihak berelasi bertujuan untuk mengurangi perilaku oportunistik pada *Related Party Transaction*,

meningkatkan keterbukaan dan melaksanakan sistem pengawasan yang lebih efektif (Chaghadari dan Shukor, 2011).

Menurut Keputusan Bapepam No: KEP-347/BL/2012 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau perusahaan Publik, pengungkapan pihak-pihak berelasi merupakan salah satu item informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Abdullah (2013) menyatakan persyaratan pengungkapan wajib dikarenakan fitur kelembagaan yang lemah, seperti kerangka peraturan yang tidak memadai, mekanisme penegakan hukum yang tidak efektif dan kekurangan akuntan yang berkualitas. Hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan standar antar negara, maka diperlukan harmonisasi atau konvergensi peraturan internasional yang kemudian akan dikontrol oleh berbagai pihak yang tentunya sudah memahami peraturan tersebut secara global.

Konvergensi IFRS akan menghapus perbedaan dalam penerapan standar antar Negara dan akan diterapkan secara bertahap sehingga nantinya akan meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman (Dewi dan Kaseh, 2011). PSAK konvergensi IFRS yang merupakan wujud harmonisasi telah dijadikan pedoman wajib atau diterapkan secara penuh pada Januari 2012. Semua penyajian, pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan harus didasarkan kepada PSAK yang telah konvergensi dengan IFRS tidak terkecuali untuk perusahaan yatau entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

Di sisi lain, penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Alasan yang mendasari penelitian ini adalah terdapat kemungkinan bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim mematuhi peraturan pengungkapan pihak berelasi dalam kenyataannya tidak mematuhi semua persyaratan dalam PSAK.

Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa perusahaan belum 100% mematuhi aturan pengungkapan wajib khususnya pihak-pihak berelasi. Menurut penelitian Alvionita (2015), rata-rata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur periode tahun 2011-2013 hanya sebesar 67%. Khusus untuk pengungkapan pihak-pihak berelasi, Apriani (2015) menemukan bahwa rata-rata pengungkapan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan sektor non keuangan periode 2008-2011 masih relatif rendah yaitu sebesar 61%. Rata-rata tersebut masih lebih rendah dibanding pengungkapan pihak-pihak berelasi yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Afrika Selatan tahun 2012-2014 yaitu sebesar 77% seperti yang ditemukan oleh Sellami dan Fendri (2017).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan item-item pengungkapan pihak-pihak berelasi yang diwajibkan dalam PSAK. Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat diketahui efektivitas penerapan PSAK No. 7 Revisi 2010 dalam meningkatkan pengungkapan pihak-pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan pada periode pengamatan pasca konvergensi IFRS.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Masalah yang mendasari dari teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan tersebut. *Agent* diwajibkan

memberikan laporan periodik pada *principal* tentang usaha yang dijalankannya. *Principal* akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya.

Asimetri informasi (*information asymetry*) timbul dalam hubungan antara agen dan prinsipal yaitu ketika beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (Scott, 1997). Praktik pengungkapan (*disclosure*) informasi oleh manajemen merupakan salah satu media penting untuk mengatasi konflik keagenan. Dengan adanya pengungkapan informasi oleh manajemen dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan kepada pemegang saham, sehingga dapat diantisipasi terjadinya penyimpangan kepentingan yang akan dilakukan manajer.

2.2. *Proprietary Cost Theory*

Proprietary Cost Theory (Verrecchia, 1983) menyatakan bahwa perusahaan membatasi pengungkapan sukarela informasi kepada pasar keuangan karena adanya biaya terkait pengungkapan (biaya *proprietary*). Biaya ini meliputi tidak hanya biaya mempersiapkan dan menyebarkan informasi tetapi juga berasal dari biaya mengungkapkan informasi yang dapat digunakan oleh pesaing dan pihak lain dengan cara yang merugikan bagi perusahaan pelapor.

Proprietary cost theory merupakan suatu landasan penting dalam menganalisis praktik pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Kerangka teori biaya *proprietary* mungkin berguna dalam menjelaskan perilaku pengungkapan perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan transaksi pihak berelasi. Pengungkapan transaksi pihak berelasi mengandung informasi rinci tentang hasil dari setiap pengungkapan transaksi pihak berelasi yang dapat membantu investor, analis atau pemangku kepentingan lainnya dalam memprediksi laba masa depan. Informasi ini dapat mengungkapkan kepada pesaing adanya peluang dalam industri yang dapat dimanfaatkan, merugikan posisi kompetitif perusahaan (Pisano dan Landriani, 2012).

2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala dimana besar kecilnya suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara salah satunya melalui total asset (Haniffa dan Cooke, 2005). Berdasarkan konsep teori keagenan, perusahaan yang lebih besar menyediakan lebih banyak pihak-pihak berelasi untuk mengurangi biaya keagenan dalam hubungan dengan stakeholder. Perusahaan besar di pasar modal merupakan entitas yang banyak disorot oleh publik, sehingga harus mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik (Nugroho, 2012). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. Menurut teori biaya *proprietary*, perusahaan besar menghadapi biaya *proprietary* yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya akumulasi informasi untuk perusahaan besar lebih rendah karena memiliki sistem pelaporan internal yang lebih luas. Hal itu didukung oleh hasil penelitian dari Sellami dan Fendri (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan pihak-pihak berelasi. Atas dasar penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi

2.4. Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap *Online Repurchase Intention*

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Sesuai dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005), dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Profitabilitas dipertimbangkan sebagai salah satu indikator kualitas investasi. Oleh karena itu, menurut teori keagenan dapat diperkirakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka perusahaan memiliki insentif yang lebih tinggi untuk mengungkapkan pihak-pihak berelasi untuk mengurangi risiko *adverse selected* oleh pasar akibat adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham.

Di sisi lain, menurut konsep *proprietary costs*, biaya kompetitif yang timbul dari pengungkapan transaksi pihak berelasi cenderung meningkat seiring dengan peningkatan profitabilitas perusahaan yang mengungkapkan, dimana justru akan membawa pada pengaruh negatif antara profitabilitas dengan pengungkapan transaksi pihak berelasi (Pisano dan Landriani, 2012). Hasil penelitian dari Apriani (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan transaksi pihak berelasi. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi

2.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris, maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan (Prawinandi, dkk, 2012). Kepemilikan saham manajerial dinilai dapat mengatasi konflik keagenan, karena dapat mensejajarkan kepentingan pemegang saham dan manajer. Hal ini dapat terjadi karena manajemen akan ikut berpartisipasi dan mengambil manfaat secara langsung dari keputusan yang diambilnya, serta ikut menanggung risiko atas kesalahan pengambilan keputusan yang mereka ambil (Astasari, 2015). Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan seluruh modal saham yang beredar (Alvionita, 2015).

Menurut Gunawan dan Hendrawati (2016), kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan transparansi. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka tingkat monitoring semakin kuat sehingga manajer akan lebih meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sesuai dengan syarat yang berlaku. Penelitian Fauziah (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Selain itu, penelitian Utami *et al.* (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi

2.6. Kepemilikan Institusional

Murni (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh pihak institusional dibanding dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Cornett dkk, 2007). Kepemilikan institusional diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki institusi dibagi dengan seluruh modal saham yang beredar (Fauziah, 2015).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional dominan akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. Kebutuhan sebuah institusi akan informasi yang bermanfaat akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Alvionita (2015) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak berelasi

2.7. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010). FCGI (2001) mengungkapkan bahwa, agar dapat menjalankan fungsinya di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. Variabel komite audit diukur dengan banyaknya anggota dalam dewan komite audit (Prawinandi, dkk, 2012)

Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* karena komite audit dapat berperan sebagai pengawas, pemeriksa serta dapat mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan. Oleh karena itu, diharapkan banyaknya anggota komite audit dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*, salah satunya adalah kewajiban pengungkapan transaksi pihak berelasi (Prawinandi, 2012). Hasil penelitian dari Gunawan dan Hendrawati (2016) menemukan pengaruh positif jumlah anggota komite audi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak berelasi

2.8. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. FCGI (2001) menyatakan bahwa, kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang *outside directors*, di mana kriteria tersebut

menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 menyebutkan bahwa, dalam komposisi dewan komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan proporsi anggota dewan komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Variabel proporsi komisaris independen diukur dengan cara membagi jumlah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Haniffa dan Cooke, 2005)

Proporsi komisaris independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Alvionita dan Taqwa (2015) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan terbebas dari kepentingan pihak manapun sehingga akan menjamin terlaksananya pengelolaan perusahaan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan pengawasan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh komisaris independen akan meningkatkan kualitas dan luasnya pengungkapan informasi oleh manajemen perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2015) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca IFRS. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak berelasi.

2.9. Konsep Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi Menurut PSAK No. 7 (Revisi 2010)

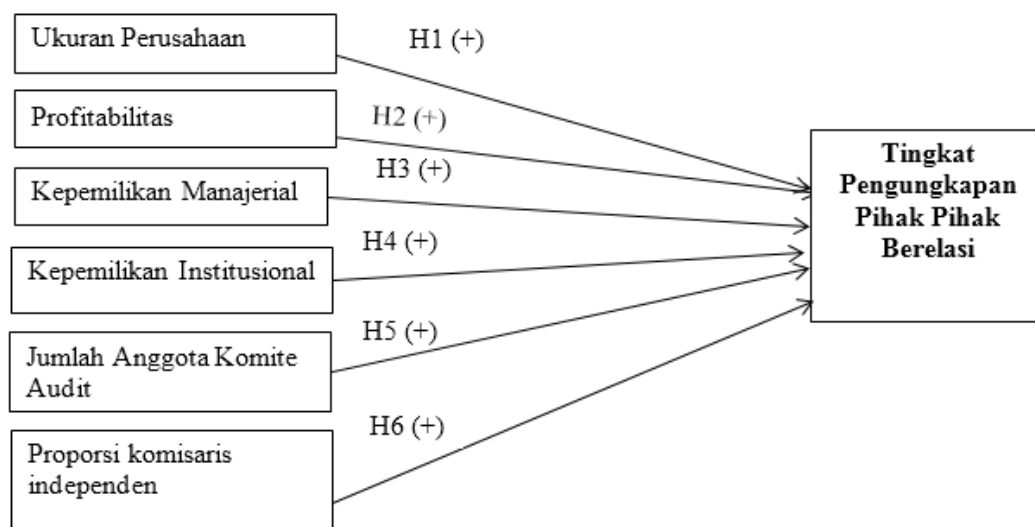
Menurut PSAK No. 7 (Revisi 2010), definisi dari pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dalam hal ini, entitas wajib mengungkapkan hubungan antara entitas induk dan entitas anak terlepas apaakah telah terjadi transaksi dengan mereka ataupun tidak. Selain itu, entitas wajib mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori, yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja, dan pembayaran berbasis saham.

Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Pengungkapan terkait dengan sifat hubungan, transaksi, dan saldo tersebut dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori, yaitu entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama dimana entitas merupakan *venturer*, personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan pihak-pihak berelasi lainnya.

Variabel pengungkapan pihak berelasi diukur dengan melihat ceklist pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010). Skor 1 untuk item diungkapkan dalam laporan keuangan dan skor 0 untuk item tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya skor yang didapat perusahaan dibagi dengan total skor yang seharusnya (Apriani, 2015).

2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis

Suatu kerangka penelitian disusun guna mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

3. Metodologi Penelitian

Populasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di BEI selama tahun 2014 – 2016 serta menyajikan data laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, perusahaan yang dijadikan sampel harus melakukan pengungkapan pihak-pihak berelasi pada laporan keuangan dan laporan tahunannya. Sumber perolehan data berasal dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di dalam situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan ICMD.

3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan, menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari publikasi resmi lembaga Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang direncanakan untuk diperoleh dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahun 2014-2016.

3.2. Teknik Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen dalam hal ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah anggota komite audit, dan proporsi komisaris independen terhadap variabel dependennya yaitu tingkat pengungkapan pihak berelasi. Analisis terhadap data dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi linier. Fungsi dari analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011).

3.3. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan pengujian hipotesis pada regresi berganda haruslah menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan asumsi-asumsi klasik, dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.4. Teknik Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen dalam hal ini adalah ukuran perusahaan, umur status terdaftar, profitabilitas, leverage, dan konsentrasi kepemilikan terhadap variabel dependennya yaitu tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Pengujian pengaruh faktor-faktor yang dihipotesiskan terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$RPD_i = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE}_{i,t} + \beta_2 \text{PROFIT}_{i,t} + \beta_3 \text{MANOWN}_{i,t} + \beta_4 \text{INSTOWN}_{i,t} + \beta_5 \text{AUDCOM}_{i,t} + \beta_6 \text{KOMSIND}_{i,t} + \varepsilon_i$$

Dimana,

RPD _i	=	Tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi perusahaan i
SIZE _i	=	Ukuran perusahaan i
PROFIT _i	=	Profitabilitas perusahaan i
MANOWN _i	=	Kepemilikan manajerial perusahaan i
INSOWN _i	=	Kepemilikan institusional perusahaan i
AUDCOM _i	=	Jumlah anggota komite audit perusahaan i
KOMSIND _i	=	Proporsi komisaris independen perusahaan i
ε _i	=	error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai 2016. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 sebanyak 146 perusahaan. Namun, perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 hanya 137 perusahaan. Dari 137 perusahaan tersebut, hanya 105 perusahaan yang menyajikan data laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, dari 105 perusahaan tersebut, terdapat 26 perusahaan yang menggunakan mata uang selain Rupiah pada laporan keuangan dan laporan tahunannya. Oleh karena itu, sampel akhir penelitian ini sebanyak 79 perusahaan selama 3 tahun pengamatan sehingga terdapat 237 *firm-years*. Selanjutnya terdapat 33 *outlier sample*, sehingga sampel akhir terdapat 204 *firm-years*.

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 berikut menyajikan hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas		Multikolinieritas			Autokorelasi		Heteroskedastisitas	
K-S Z	0,915		Tolerance	VIF	Runs Test	0,068	Uji White	
Asymp. Sig (2-tailed)	0,373	SIZE	0,856	1,169			SIZE	0,346
		PROFIT	0,847	1,180			PROFIT	0,075
		MANOWN	0,859	1,164			MANOWN	0,082
		INSOWN	0,926	1,080			INSOWN	0,812
		AUDCOM	0,839	1,192			AUDCOM	0,296
		KOMSIND	0,943	1,060			KOMSIND	0,946
Memenuhi		Memenuhi			Memenuhi		Memenuhi	

4.3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Berdasarkan output SPSS, dapat diketahui bahwa jumlah sampel pengamatan (N) sebesar 204. Dari 204 sampel tersebut, tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi terkecil sebesar 5,6% dan terbesar 72,2% dengan rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi sebesar 36,9% dan deviasi standar sebesar 0,144. Dengan rata-rata sebesar 36,9% tersebut, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak item-item pengungkapan wajib yang belum diungkapkan perusahaan. Nilai terkecil dari variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan yaitu sebesar Rp 100,3 miliar, dan nilai aset terbesar yaitu Rp 261 triliun. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar Rp 9,22 triliun dengan deviasi standar sebesar Rp 28,33 triliun.

Profitabilitas terendah yaitu sebesar -54,8% dan tertinggi sejumlah 43,2%. Rata-rata profitabilitas sebesar 5,8% dengan deviasi standar sebesar 0,103. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai nominal 0% dan nilai maksimal 99,4% dengan rata-rata sebesar 69,5% dan deviasi standar sebesar 0,193. Data statistik pada variabel kepemilikan manajerial didapat hasil seimbang antara sampel perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak manajemen dengan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak non-manajemen yaitu masing-masing sebanyak 102 perusahaan. Variabel jumlah anggota komite audit menunjukkan jumlah terkecil yaitu sebanyak 2 orang dan jumlah terbesar yaitu sebanyak 5 orang dengan rata-rata sebanyak 3 orang dan deviasi standar sebesar 0,538. Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai minimal 0% dan maksimal 80% dengan rata-rata sebesar 37,4% dan nilai deviasi standar sebesar 0,135.

4.4. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dari tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R^2 adalah 0,315. Hal ini berarti 31,5% variasi tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi dapat dijelaskan oleh variasi keenam variabel independen Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Anggota Komite Audit, dan Proporsi Komisaris Independen. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 0,11954. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 16,586 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi RPD atau dapat dikatakan bahwa SIZE, PROFIT, MANOWN, INSOWN, AUDCOM, dan KOMSIND secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap RPD.

4.6. Uji Statistik t

Berdasarkan hasil SPSS, dapat diketahui bahwa dari ketujuh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (PROFIT), kepemilikan manajerial (MANOWN), dan jumlah anggota komite audit (AUDCOM) signifikan pada 0,05. Sedangkan variabel lain yaitu kepemilikan institusional (INSOWN) dan proporsi komisaris independen (KOMSIND) tidak signifikan pada 0,05. Di sini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi (RPD) dipengaruhi oleh SIZE, PROFIT, MANOWN dan AUDCOM.

Adapun persamaan matematis dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{SEGDISC} = -0,321 + 0,030 \text{ SIZE} + 0,490 \text{ PROFIT} + 0,064 \text{ MANOWN} + 0,080 \text{ INSOWN} + 0,037 \text{ AUDCOM} + 0,055 \text{ KOMSIND}$$

4.7. Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,030 yang berarti bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah positif. Nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar merupakan determinan dalam tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi yang lebih tinggi. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) serta Astasari dan Nugrahanti (2015)

4.8. Pengujian Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Pengungkapan Pihak-pihak berelasi

Hipotesis kedua menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas perusahaan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,490 yang berarti bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah positif. Nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Apriani (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan determinan yang signifikan bagi meningkatnya tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi.

4.9. Pengujian Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Pihak-pihak berelasi

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,064 yang berarti bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah positif. Nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan determinan yang signifikan bagi meningkatnya tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi

4.10. Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Pihak-pihak berelasi

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi

dengan tanda positif sebesar 0,080 yang berarti bahwa pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah positif. Nilai signifikansi sebesar 0,076 dimana lebih besar dari derajat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) ditolak.

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional suatu perusahaan bukan merupakan penentu tingginya tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015) serta Fauziah (2015).

4.11. Pengujian Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Pihak-pihak berelasi

Hipotesis kelima menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen jumlah anggota komite audit perusahaan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,037 yang berarti bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah positif. Nilai signifikansi sebesar 0,030 dimana lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) diterima.

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit merupakan determinan yang signifikan bagi meningkatnya tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi.

4.12. Pengujian Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Pihak-pihak berelasi

Hipotesis keenam menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen proporsi komisaris independen memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,055 yang berarti bahwa pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah negatif. Nilai signifikansi sebesar 0,393 dimana lebih besar dari derajat kepercayaan (α) 0,05. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) ditolak. Hasil regresi menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen suatu perusahaan bukan merupakan penentu tingginya tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2015).

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama hipotesis satu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung akan memiliki tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi yang lebih baik. Selanjutnya, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, maka akan terjadi peningkatan item pihak-pihak berelasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 7 Revisi 2010.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan pihak-pihak berelasi diterima. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak manajemen memiliki tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi yang lebih tinggi daripada perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak manajemen. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan pihak-pihak berelasi ditolak. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh institusi memiliki tidak menjadi penentu tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi yang lebih tinggi.

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi diterima. Hasil ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang lebih banyak maka akan melakukan pengungkapan pihak-pihak berelasi dengan lebih baik. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komisaris independen lebih banyak di dalam proporsi dewan komisaris tidak dapat menjadi pengungkit tingginya tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hasil ini dapat memberikan umpan balik terhadap regulator di Indonesia terkait dengan praktik pengungkapan pihak berelasi saat ini oleh perusahaan yang terdaftar di BEI serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pihak berelasi tersebut.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya melihat pada faktor-faktor determinan dari tingkat kepatuhan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan dalam model penelitian ini, dan belum meneliti pengaruh dari pengungkapan pihak-pihak berelasi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel-variabel lain sebagai faktor penentu tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi seperti kualitas laba, likuiditas, dan kompleksitas perusahaan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat pula meneliti pengaruh dari pengungkapan pihak-pihak berelasi yang dilakukan perusahaan terhadap nilai perusahaan, kinerja saham, atau kualitas laba.

Referensi

- [1] Abdullah, Mazni dkk. (2013). "Some Observations on Mandatory Disclosure Practices of Malaysian Public Listed Companies". *Middle-East Journal of Scientific Research*. 17 (9): 1228-1236
- [2] Alvionita, Intan dan Taqwa, Salma. (2015). "Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*". Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [3] Apriani, Heni Werdi. (2015). "Pengaruh *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 4 No. 1: 36 - 50
- [4] Astasari, Kristiana G.A dan Nugrahanti, Yeterina W. (2015). "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan". *DeReMa Jurnal Manajemen*. Vol. 10 No. 2
- [5] Boediono, Gideon SB., (2005). "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *corporate Governance* dan dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur". Simposium Nasional Akuntansi 8 : Ikatan Akuntan Indonesia.

- [6] Chaghadari, M.F. dan Z.A.Shukor, (2011). “Corporate Governance and Disclosure Of Related Party Transaction” *International and Conference on Economics and Business Reseacrh*.
- [7] Cornett, Marcia M, dkk. (2007). “The Impact of Institutional Ownership on Corporate Operating Performance”. *Journal of Banking & Finance* vol 31. pp 1771–1794
- [8] Dewi, R. Rosiana dan Kaseh. (2011). “Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol.11 No.2, Agustus.
- [9] Fauziah, Isna. (2015). “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS”. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5 No. 2
- [10] Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). “Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance”.
- [12] Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Gunawan, Barbara dan Hendrawati, Eka R. (2016). Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 1 No. 1
- [14] Haniffa, R. M., dan T. E. Cooke. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 391–430.
- [15] Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*. Jakarta: DSAK IAI
- [16] Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics*. October: 305-360
- [17] Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/B1/2012 Tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- [18] Kohlbeck, M dan Brian W Mayhew. 2010. “Valuation of Firms that Disclose Related Party Transaction”. *Journal of Accounting and Public Policy* 29: 115-137.
- [19] Murni, Yetti. 2015. “The Influence of Managerial Ownership, Institutional Ownership and Voluntary Disclosure on Financial Performance and Its Implication on The Corporate Value.” *International Journal of Business and Management Invention*. Vol. 4 Issue 5. PP 52-64.
- [20] Nugroho, Agus Sumarnadi. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 1 No. 12
- [21] Pisano, S. dan L. Landriani. 2012. “The Determinants of Segment Disclosure: an Empirical Analysis on Italian Listed Companies”. *Financial Reporting*. Vol. 1
- [22] Prawinandi, W., dkk. 2012. Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin :Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- [23] Scott, W.R. 1997. *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- [24] Sellami, Yosra Mnif dan Fendri, Hela Borgi. 2017. "The Effect of Audit Committee Characteristics on Compliance with IFRS for Related Party Disclosures: Evidence from South Africa", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 32 Issue: 6

- [25] Utami, W. D., dkk. 2012. “Investigasi Dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*.” *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- [26] Verrecchia, R. 1983. “Discretionary Disclosure”. *Journal of Accounting and Economics*, 5: 179-94.